

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi, Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014-2017 memiliki rata-rata derajat desentralisasi sebesar 9,01%. Berdasarkan kriteria penilaian maka derajat desentralisasi Kabupaten Manggarai dikategorikan rendah sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah belum mampu untuk berotonomi.
2. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Rasio Ketergantungan memiliki rata-rata rasio sebesar 90,16%. Berdasarkan kriteria penilaian maka ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai dikategorikan tinggi sekali terhadap dana transfer dalam penyelenggaraan roda pembangunannya.
3. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan memiliki rata-rata rasio sebesar 10,05%. Berdasarkan kriteria penilaian kemandirian maka Kabupaten manggarai dikategorikan memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali dalam penyelenggaraan pembangunannya.
4. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Rasio efektivitas PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 96,34%, selama tahun 2014-2017. Berdasarkan kriteria penilaian maka secara umum efektivitas PAD

dikatakan cukup efektif dalam merealisasi target PAD yang telah dianggarkan.

5. Kinerja PAD dilihat dari rasio efisiensi memiliki rata-rata rasio 2,10%. Berdasarkan kriteria penilaian maka efisiensi PAD kabupaten Manggarai secara umum dikategorikan sangat efisien dalam memobilisasi pemunggutan PAD.
6. Rasio PAD terhadap Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 10,29%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD dari tahun 2014-2017 terhadap belanja daerah secara umum dikategorikan sangat rendah bila dibandingkan dengan dana transfer.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu meningkatkan dan mengali potensi dan sumber PAD yang baru serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan derajat desentralisasi, menurunkan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer serta meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai juga harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi PAD demi terlaksananya otonomi daerah.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka terhadap pembangunan daerah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan tentang pajak serta mempermudah proses pembayaran pajak dan retribusi

3. Pemerintah perlu meningkatkan sumber daya manusia secara khusus bagi aparat pemerintah untuk lebih kreatif dalam mengolah dan mencari sumber PAD yang baru.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dan melakukan penagihan langsung terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak sehingga target pajak yang telah dianggarkan dapat terealisasi.
5. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sarana prasarana pariwisata seperti Danau Ranamese dan Liang Bua sehingga menarik para wisatawan untuk berkunjung sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
6. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak rasio mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I .(2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Cahyadi, Mhd Ichwan. (2012). “*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru. Di akses pada tanggal 5 Mei 2019.
- Halim, K. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 4*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hironimus Ola Bao. (2018). “*Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 – 2015*”. *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira
- Mahmudi. (2010). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi.(2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo.(2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moh. Mashun,F. S. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: BPFE.
- Ola, Thomas dan Kroon, Kornelius Kelemur, 2016 “*Analisis Perbandingan Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Pemekaran dan Kabupaten induk Di Provinsi NTT*”. *Jurnal Riset Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira*.
- Pramita, Puput Risky. (2015). “*Analisis Rasio untuk Menilai kinerja Keuangan Daerah Kabupaten kebumen Thaun 2009-2013*”.*Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.Di akses pada Tanggal 3 Mei 2019.
- Siahaan,M.P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Rahayu, Ilham Wahyudi dan Yudi. (2009). “*Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Di Lihat Dari Perspektif Akuntabilitas*”.Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi. Di akses pada tanggal 12 April 2009.
- Suryabrata,S, 2000, “*Metodologi Penelitian*”, PT Raja Grafindo Perkasa: Jakarta.
- Tjandar, W. Riawan, 2017, “*Hukum Keuangan Negara*”, Grasindo: Jakarta